

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN REGULASI PENGELOLAAN PASAR RAKYAT  
PANORAMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BENGKULU PROVINSI  
BENGKULU**

AGAM REFALDI

NPP. 30.0404

*Asdakota Bengkulu Provinsi Bengkulu  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: agamrefaldi.ar83@gmail.com

**ABSTRACT (in English)**

**Problems/Background (GAP):** *Lack of public legal awareness, limited facilities and infrastructure, limited number of personnel, unclear sanctions, and imbalance between the number of traders and places to sell are problems in the effective enforcement of Panorama market regulations by the Bengkulu Satpol PP. **Purpose:** The aim of enforcing the regulation on the management of the Panorama People's Market by the Bengkulu Satpol PP is to create order, security and compliance with market rules in order to provide a safe, orderly environment and provide benefits to the community and business actors. **Methods:** Research methods include literature studies, field observations, interviews, and data analysis. Data were analyzed descriptively to identify problems and inhibiting factors, as well as to formulate recommendations to increase the effectiveness of the enforcement of the Panorama market regulations by the Bengkulu Satpol PP. **Results:** The results showed the lack of public legal awareness, limited facilities and infrastructure, a limited number of personnel, unclear sanctions, and an imbalance in the number of traders and places to sell as the main factors influencing the effectiveness of the enforcement of Panorama market regulations by the Bengkulu Satpol PP. **Conclusion:** In conclusion, it is necessary to increase public legal awareness, improve facilities and infrastructure, add personnel, reinforce sanctions, and balance the number of traders and places to sell to increase the effectiveness of enforcing the Panorama market regulations by the Bengkulu Satpol PP.*

**Keywords:** *Effectiveness, Market, Civil Service Police Unit*

**ABSTRAK (in bahasa)**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** *Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah personel yang terbatas, sanksi yang belum tegas, serta ketidakseimbangan antara jumlah pedagang dan tempat berjualan menjadi permasalahan dalam efektivitas penegakan regulasi pasar Panorama oleh Satpol PP Bengkulu. **Tujuan:** Tujuan penegakan regulasi pengelolaan Pasar Rakyat Panorama oleh Satpol PP Bengkulu adalah menciptakan ketertiban, keamanan, dan kepatuhan terhadap aturan pasar guna memberikan lingkungan yang aman, tertib, dan memberi manfaat bagi masyarakat serta pelaku usaha. **Metode:***

Metode penelitian meliputi studi literatur, observasi lapangan, wawancara, dan analisis data. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi permasalahan dan faktor penghambat, serta merumuskan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas penegakan regulasi pasar Panorama oleh Satpol PP Bengkulu. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah personel yang terbatas, sanksi yang belum tegas, serta ketidakseimbangan jumlah pedagang dan tempat berjualan sebagai faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan regulasi pasar Panorama oleh Satpol PP Bengkulu. **Kesimpulan:** Kesimpulannya, perlu dilakukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, perbaikan sarana dan prasarana, penambahan personel, penegasan sanksi, serta penyeimbangan jumlah pedagang dan tempat berjualan untuk meningkatkan efektivitas penegakan regulasi pasar Panorama oleh Satpol PP Bengkulu.

**Kata kunci:** Efektivitas, Pasar, Satuan Polisi Pamong Praja

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan zaman pada era saat ini ditandai dengan adanya era globalisasi, hal tersebut dapat terlihat dari berbagai perkembangan dan perubahan lingkungan. Dampak dari adanya perubahan ini seperti adanya perubahan terhadap tatanan kehidupan manusia baik di bidang politik, ekonomi, hukum, pemerintahan serta kehidupan sosial budaya. Perubahan ini juga terjadi dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Model pemerintahan dan pembangunan terpusat kurang praktis, sehingga diperlukan pendekatan desentralisasi. Pendekatan ini menekankan bahwa pemerintah pusat harus bertindak sebagai penjaga proses interaktif untuk menciptakan suasana yang menguntungkan bagi proses interaktif kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat. Ada anggapan dari sebagian masyarakat yang merasakan bahwa peraturan dan kebijakan pemerintah daerah tidak adil, bahkan mereka menganggap hukum hanya untuk menindas saja. Pembangunan perkotaan tidak pernah memihak pada rakyat kecil contohnya kepada pedagang kaki lima. Perlakuan para petinggi Negara atau Pemerintah Daerah semena-mena pada sektor informal atau pedagang kaki lima dengan menggunakan cara kekerasan yaitu dengan menggusur pedagang kecil. Pedagang Kaki Lima (sektor informal) menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir jalan umum, pasar dan tempat lainnya. Mereka melakukan kegiatan usaha dagang secara perorangan atau kelompok. Kegiatan usaha dagangnya dilakukan dengan jangka waktu tertentu dan menggunakan sarana atau perlengkapan yang sederhana, mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan biasanya menggunakan lahan fasilitas umum.

Permasalahan yang dihadapi dalam efektivitas penegakan regulasi pengelolaan Pasar Rakyat Panorama oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap regulasi pasar rakyat. Satpol PP Kota Bengkulu mungkin menghadapi kesulitan dalam menjalankan tugas mereka karena terdapat kurangnya pemahaman dan kesadaran yang memadai di kalangan pedagang dan pengunjung pasar terkait aturan-aturan yang berlaku. Kondisi ini dapat menyebabkan pelanggaran terhadap regulasi pasar rakyat, seperti pembangunan kios yang tidak sesuai dengan ketentuan, pelanggaran tata tertib pasar, atau ketidakpatuhan terhadap izin usaha. Kurangnya pemahaman dan kesadaran ini juga dapat berdampak pada kesulitan Satpol PP dalam memberikan edukasi dan penegakan hukum yang efektif, serta berpotensi meningkatkan tingkat pelanggaran dan ketidakdisiplinan di Pasar Rakyat Panorama. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait regulasi pasar rakyat, baik melalui

kampanye edukasi, sosialisasi, maupun penegakan hukum yang tegas agar regulasi pengelolaan Pasar Rakyat Panorama dapat diterapkan dengan efektif.

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang tersebut, peneliti menyiapkan beberapa rumusan masalah pada penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja kota Bengkulu dalam menegakkan Regulasi pengelolaan pasar rakyat Panorama Kota Bengkulu ?
2. Apa hambatan dan solusi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu dalam menegakkan Regulasi pengelolaan pasar rakyat Panorama Kota Bengkulu?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu dalam meminimalisir hambatan dalam penegakan Regulasi Pasar Panorama Kota Bengkulu?

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa kesenjangan masalah yang diambil (GAP penelitian) terkait efektivitas penegakan regulasi pengelolaan Pasar Rakyat Panorama oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur pengelolaan Pasar Rakyat Panorama, masih terdapat kesenjangan dalam efektivitas penegakan regulasi tersebut. Regulasi yang ada mungkin tidak sepenuhnya diterapkan atau diawasi dengan baik oleh Satpol PP Kota Bengkulu. Hal ini dapat terjadi karena adanya hambatan atau kendala tertentu dalam pelaksanaan tugas Satpol PP, seperti kurangnya sumber daya manusia, kurangnya pelatihan dan pemahaman terkait regulasi, atau kurangnya koordinasi antara Satpol PP dengan pihak terkait. Selain itu, kesenjangan juga dapat terjadi karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait regulasi pasar rakyat. Jika pedagang dan pengunjung pasar tidak memahami aturan-aturan yang berlaku, mereka cenderung melanggar regulasi tersebut tanpa sadar atau mengabaikannya. Hal ini akan mengurangi efektivitas penegakan regulasi oleh Satpol PP. Dalam konteks ini, perlu dilakukan penelitian yang mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan dalam efektivitas penegakan regulasi pengelolaan Pasar Rakyat Panorama. Penelitian tersebut dapat mencakup analisis terhadap peran dan kinerja Satpol PP, faktor-faktor hambatan yang dihadapi, serta tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait regulasi pasar rakyat. Dengan demikian, hasil penelitian tersebut dapat memberikan masukan yang berharga untuk perbaikan dan peningkatan efektivitas penegakan regulasi pasar rakyat oleh Satpol PP Kota Bengkulu..

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Muhammad Fauzan Fikri Astira pada tahun 2022 berjudul "Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada Kawasan Pasar Dempo Permai Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan." Penelitian ini menunjukkan bahwa penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum efektif dalam mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Pasar Dempo Permai.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Eko Susanto pada tahun 2019 berjudul "Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Metro; Studi Kasus di Pasar Cendrawasih Kota Metro." Penelitian ini menyoroti upaya pemberdayaan pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Metro. Meskipun telah dilakukan pembinaan dan pemberdayaan, penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya tersebut belum maksimal, kurang terprogram dengan baik, dan kurang konsisten.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Paiman Raharjo pada tahun 2018 berjudul "Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan." Penelitian ini menunjukkan bahwa penertiban pedagang kaki lima di Pasar Kebayoran

Lama telah dinilai cukup baik dan berhasil. Meskipun masih terdapat kendala, penertiban tersebut dianggap efektif berdasarkan harapan masyarakat sekitar pasar.

Secara umum, ketiga penelitian ini memiliki fokus yang berbeda namun berkaitan dengan penertiban pedagang kaki lima di pasar. Penelitian pertama menyoroti peran Satuan Polisi Pamong Praja, penelitian kedua menekankan pemberdayaan pedagang, dan penelitian ketiga mengevaluasi efektivitas penertiban di pasar tertentu.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pemahaman tentang efektivitas penegakan regulasi dalam pengelolaan pasar rakyat, khususnya di Pasar Rakyat Panorama Kota Bengkulu. Melalui pendekatan yang komprehensif, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan dalam penegakan regulasi, baik dari perspektif internal Satpol PP maupun dari faktor eksternal seperti kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap aturan-aturan yang berlaku.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Regulasi yang terjadi di Pasar Panorama Kota Bengkulu yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

## **II. METODE**

Metode yang dapat digunakan dalam penelitian mengenai efektivitas penegakan regulasi pengelolaan Pasar Rakyat Panorama oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dapat mencakup beberapa tahapan. Pertama, dilakukan studi literatur untuk memahami regulasi yang ada, peran Satpol PP, dan konteks pengelolaan pasar rakyat. Studi literatur ini akan memberikan landasan teoritis dan pemahaman yang mendalam tentang masalah yang sedang diteliti. Selanjutnya, penelitian ini dapat menggunakan metode observasi lapangan untuk mengumpulkan data secara langsung di Pasar Rakyat Panorama. Observasi ini dapat dilakukan dengan mengamati aktivitas sehari-hari di pasar, termasuk interaksi antara Satpol PP, pedagang, dan pengunjung. Data dapat dicatat mengenai pelaksanaan regulasi, pelanggaran yang terjadi, faktor-faktor hambatan yang dihadapi, serta interaksi dan dinamika yang terjadi di pasar.

Selain itu, wawancara dengan pihak terkait juga dapat dilakukan. Responden yang relevan untuk diwawancarai dapat meliputi anggota Satpol PP, pedagang, pengunjung pasar, serta perwakilan dari instansi terkait, seperti Dinas Perdagangan dan Dinas Pekerjaan Umum. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pandangan dan pengalaman mereka terkait efektivitas penegakan regulasi, hambatan yang dihadapi, serta saran dan rekomendasi untuk perbaikan. Selanjutnya, data yang terkumpul dapat dianalisis secara kualitatif. Analisis ini melibatkan pengorganisasian dan penafsiran data yang telah dikumpulkan, identifikasi temuan-temuan penting, dan pembentukan pola atau tema yang muncul dari data. Hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menyusun rekomendasi yang sesuai.

Dalam penelitian ini, penting juga untuk mempertimbangkan etika penelitian, seperti memastikan kerahasiaan data dan memperoleh persetujuan dari pihak yang terlibat dalam penelitian. Selain itu, triangulasi dapat dilakukan dengan membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai sumber untuk memperkuat keabsahan dan kepercayaan hasil penelitian. Dengan menggunakan pendekatan kombinasi antara studi literatur, observasi lapangan,

wawancara, dan analisis kualitatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas penegakan regulasi pengelolaan Pasar Rakyat Panorama oleh Satpol PP Kota Bengkulu dan menghasilkan rekomendasi yang berguna untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dalam pengelolaan pasar rakyat.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian ini, ditemukan beberapa hasil yang relevan terkait efektivitas penegakan regulasi pengelolaan Pasar Rakyat Panorama oleh Satpol PP Kota Bengkulu. Evaluasi pelaksanaan regulasi menunjukkan adanya tingkat kepatuhan yang bervariasi dari pedagang dan pengunjung pasar terhadap aturan-aturan yang ada. Dalam beberapa kasus, terdapat pelanggaran yang signifikan terhadap regulasi, seperti pembangunan kios yang tidak sesuai dengan ketentuan atau ketidakpatuhan terhadap izin usaha. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan penegakan hukum dan pengawasan yang lebih ketat.

Selain itu, faktor-faktor hambatan juga teridentifikasi sebagai penghambat efektivitas penegakan regulasi. Faktor internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kekurangan pelatihan, menjadi kendala bagi Satpol PP dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, faktor eksternal, seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap regulasi pasar rakyat, menyebabkan rendahnya kepatuhan dari pedagang dan pengunjung pasar. Persepsi dan pengalaman anggota Satpol PP, pedagang, dan pengunjung pasar juga memberikan wawasan yang berharga terkait tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam penegakan regulasi.

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, disusunlah beberapa rekomendasi perbaikan. Rekomendasi ini meliputi upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang regulasi pasar rakyat melalui kampanye edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif. Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas Satpol PP melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan. Perbaikan regulasi yang lebih jelas dan terstruktur juga menjadi rekomendasi, termasuk penyusunan aturan yang lebih terperinci dan pemantauan yang lebih ketat terhadap pelaksanaannya. Hasil dan pembahasan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan dan masalah yang ada dalam penegakan regulasi pengelolaan Pasar Rakyat Panorama. Rekomendasi perbaikan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk perancangan strategi yang lebih efektif dalam pengelolaan pasar rakyat, dengan tujuan menciptakan lingkungan pasar yang lebih teratur, aman, dan memenuhi standar yang ditetapkan.

#### 1.1 Faktor Penghambat

Permasalahan yang dihadapi dalam penegakan regulasi pengelolaan Pasar Rakyat Panorama oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat: Masyarakat kurang sadar akan pentingnya mentaati peraturan yang berlaku. Sosialisasi peraturan daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Pasar Rakyat perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat.
2. Kurangnya sarana dan prasarana: Keterbatasan sarana dan prasarana, terutama kendaraan operasional, menghambat Satpol PP dalam melakukan pengawasan dan penegakan peraturan daerah. Sarana dan prasarana yang memadai perlu disediakan untuk memaksimalkan tugas penegakan regulasi.

3. Kurangnya personel Satpol PP: Kurangnya jumlah personel Satpol PP Kota Bengkulu mempengaruhi efektivitas penegakan regulasi. Dibutuhkan bantuan dari instansi terkait, seperti Dinas Pasar Kota Bengkulu, TNI, dan Polri untuk mendukung giat penegakan peraturan daerah.
4. Sanksi yang belum tegas: Sanksi yang diberikan belum cukup tegas sehingga tidak efektif dalam menimbulkan efek jera terhadap pelanggaran. Diperlukan sanksi yang lebih tegas untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di Pasar Panorama Kota Bengkulu.
5. Jumlah pedagang dan tempat yang tidak seimbang: Jumlah pedagang yang bertambah namun lahan yang terbatas menyebabkan keadaan pasar menjadi sesak dan tidak tertib. Ketidakseimbangan antara jumlah pedagang dan tempat berjualan mengurangi ketertiban pasar.

Permasalahan-permasalahan ini perlu menjadi fokus perhatian dalam upaya perbaikan dan peningkatan efektivitas penegakan regulasi pengelolaan Pasar Rakyat Panorama oleh Satpol PP Kota Bengkulu.

## **1.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pertama, kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan regulasi. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan yang berlaku menyebabkan terjadinya pelanggaran yang signifikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang lebih intensif dalam sosialisasi peraturan daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin masyarakat.

Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala dalam menjalankan tugas penegakan regulasi. Kondisi cuaca yang tidak menentu dan keterbatasan kendaraan operasional roda empat membatasi kemampuan Satpol PP untuk melakukan pengawasan secara optimal. Dalam hal ini, diperlukan upaya untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk kendaraan roda dua yang memungkinkan percepatan pergerakan menuju lokasi.

Selanjutnya, kurangnya personel Satpol PP juga menjadi hambatan dalam efektivitas penegakan regulasi. Giat penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satpol PP perlu didukung oleh pihak terkait, seperti Dinas Pasar Kota Bengkulu, serta anggota TNI dan Polri, mengingat jumlah personel Satpol PP yang terbatas. Kolaborasi antara instansi terkait akan memperkuat upaya penegakan regulasi.

## **1.3 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Selain temuan utama yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa diskusi temuan menarik lainnya yang muncul dalam penelitian mengenai efektivitas penegakan regulasi pengelolaan Pasar Rakyat Panorama oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Pertama, peran dan koordinasi antara Satpol PP, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya menjadi faktor penting dalam penegakan regulasi. Dalam mengelola pasar rakyat, diperlukan kerjasama yang erat antara Satpol PP dengan pihak-pihak terkait dalam hal pengawasan, penegakan hukum, dan pemantauan pelaksanaan regulasi. Koordinasi yang baik dan sinergi antara instansi terkait akan memperkuat efektivitas penegakan regulasi.

Kedua, perlu adanya upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dan pelatihan bagi anggota Satpol PP yang terlibat dalam penegakan regulasi pasar. Dengan pemahaman dan keterampilan yang memadai, anggota Satpol PP akan lebih efektif dalam melaksanakan tugas pengawasan, penegakan hukum, dan memberikan edukasi kepada pedagang dan masyarakat terkait

regulasi pasar rakyat.

Selanjutnya, perbaikan regulasi yang lebih jelas dan terstruktur juga menjadi diskusi penting. Penyusunan aturan yang lebih terperinci dan transparan akan membantu dalam memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi pasar rakyat. Selain itu, pemantauan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan regulasi perlu dilakukan untuk memastikan penegakan yang konsisten dan adil.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai efektivitas penegakan regulasi pengelolaan Pasar Rakyat Panorama oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi efektivitas penegakan regulasi pasar tersebut. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah personel yang terbatas, sanksi yang belum tegas, serta ketidakseimbangan antara jumlah pedagang dan tempat berjualan merupakan beberapa faktor utama yang menjadi hambatan dalam mencapai efektivitas penegakan regulasi. Dalam mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif dan terkoordinasi.

Kesimpulannya, peningkatan efektivitas penegakan regulasi pengelolaan Pasar Rakyat Panorama membutuhkan upaya yang komprehensif, meliputi peningkatan kesadaran hukum masyarakat, perbaikan sarana dan prasarana, penambahan personel, penegasan sanksi, serta penyeimbangan antara jumlah pedagang dan tempat berjualan. Dengan mengatasi permasalahan ini, diharapkan pasar rakyat dapat berfungsi dengan baik sebagai tempat perdagangan yang tertib, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bengkulu.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitiannya serta ada beberapa lokasi yang belum dapat dijangkau peneliti.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan peran satpol-pp dalam menjagakeamanan dan ketertiban umum. Untuk menemukan hasil yang lebih mendalam

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kepala Seksi, Camat dan Kasi Trantib serta pihak-pihak lain yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Astira, Fauzan. 2022. *Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pada Kawasan Pasar Dempo Permai Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan*. Skripsi. Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Susano, Eko. 2019. *Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Metro (Studi Kasus di Pasar Cendrawasih Kota Metro)*. Skripsi. Lampung: IAIN Metro
- Raharjo, Paiman. 2018. *Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan*. *Public Administration Journal*.

## **Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kota Bengkulu

Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 06 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat